

## KINERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2014

Ardiana Nungky Asokawati  
*ardiananungky@gmail.com*  
Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to find out the performance of the Local Technical Implementation Unit (UPTD) Motor Vehicle Testing of Nganjuk District through Value for Money approach. This research is a qualitative research and the object of the research is the Local Technical Implementation Unit (UPTD) Motor Vehicle Testing of Nganjuk District about the performance which is stated in the Accountability Report of Government Agency Performance (LAKIP) of 2014. The data collection technique has been done by performing interview technique and documentation whereas the data analysis has been done by using qualitative descriptive approach which is carried out by collecting, identifying, describing, analyzing, and making conclusion. Based on the result of the research, it shows that the Local Technical Implementation Unit (UPTD) Motor Vehicle Testing of Nganjuk District has reached the economic and efficiency level quite well. Although the result of the analysis of performance of this agency has already reached, the effectiveness should be directed to success the programs and activities.*

**Keywords :** *Value for Money, Economic Performance, Efficiency of the Performance, and Effectiveness of the Performance.*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pengujian Kendaraan Bermotor Daerah Kabupaten Nganjuk melalui pendekatan *Value For Money*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, objek yang diteliti adalah UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Daerah Kabupaten Nganjuk mengenai kinerja yang terdapat pada LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2014. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi, sedangkan teknis analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan, mengidentifikasi, mendeskripsikan, menganalisis, dan memberikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Daerah Kabupaten Nganjuk telah mencapai tingkat ekonomi dan efisiensi dengan baik. Meskipun hasil analisis kinerja instansi tersebut sudah tercapai, dari segi efektivitas harus diarahkan pada keberhasilan program dan kegiatan.

Kata kunci : *Value For Money, Kinerja Ekonomi, Kinerja Efisiensi, Kinerja Efektivitas*

### PENDAHULUAN

Sektor publik merupakan sektor pelayanan yang menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat umum dengan sumber dana yang berasal dari pajak dan penerimaan negara lainnya, di mana kegiatannya banyak diatur dengan ketentuan atau peraturan (Rai, 2008:3). Organisasi sektor publik dijalankan bukan untuk mencari laba (*non-profit-oriented*), melainkan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakatnya (Nordiawan, 2009:3). Pemerintah berkewajiban melayani setiap warga negara atau penduduk untuk memenuhi haknya. Oleh karena itu dalam melayani masyarakat harus mengutamakan kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu hal yang dapat dijadikan alat untuk menilai pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah adalah dengan melihat kinerja keuangan daerah melalui perhitungan dan analisis pencapaian target dan realisasi dari penerimaan dan pengeluaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik dari sisi *input*, *output*, dan *outcome*-nya. Kinerja keuangan merupakan salah satu isu yang sangat penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan, sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah daerah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya secara baik. Semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga negara diharapkan dapat mengurangi terjadinya pemborosan, kebocoran dana dan mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi.

Salah satu cara yang biasa dilakukan untuk evaluasi adalah dengan melakukan pengukuran/penilaian kinerja, mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai pada tahap terlaksananya anggaran dengan menggunakan konsep *Value For Money*. *Value For Money* merupakan salah satu prinsip penting anggaran kinerja dari *good governance*. Menurut Ulum (2009:24) menyatakan bahwa kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *Value For Money*. *Value For Money* sendiri pengelolaannya mencakup tiga elemen, yaitu ekonomi (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya, dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Menurut Liando dan Elim (2014) dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode *Value For Money*. Penelitian ini pelaksanaannya dilakukan di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan menggunakan metode kuantitatif. Ditinjau dari segi ekonomis, dimana untuk tahun 2013 terjadi sedikit penurunan dibanding dengan tahun 2012, dimana tahun 2012 mencapai 93,89% sedangkan tahun 2013 mencapai 92,78%. Hasil analisa ekonomis berdasarkan data laporan keuangan dari jumlah realisasi belanja menunjukkan bahwa analisa ekonomis masih didominasi oleh belanja pegawai. Ditinjau dari segi efisiensi, dapat dikatakan kinerja pengelolaan anggaran belanja pemerintah sudah baik karena nilai *output* lebih besar dari nilai *input* yang digunakan. Ditinjau dari segi efektifitas, dari hasil analisa menunjukkan bahwa tingkat efektifitas penggunaan anggaran dan alokasi anggaran secara nominal tahun 2012 dengan presentase 93,89% lebih kecil dari tahun 2013 dengan presentase 92,78%, artinya bahwa pengelolaan anggaran ditahun 2012 lebih efektif dibanding dengan tahun 2013.

Purnamasari dan Cipta (2014) dalam penelitian yang berjudul Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berdasarkan *Value For Money* Audit Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2007-2011. Penelitian ini dilakukan di Daerah Kabupaten Buleleng. Alat analisis yang digunakan adalah pengukuran ekonomis, pengukuran efisiensi, dan pengukuran efektifitas, berdasarkan hasil pengukuran pada indikator ekonomis menunjukkan bahwa sangat ekonomis dengan presentase 124,85%.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng telah dapat mengelola kegiatannya ekonominya dengan baik, dengan biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan operasional lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang ditetapkan. Pada indikator efisiensi berada pada kriteria cukup efisien yaitu dengan presentase 86,86%. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng belum menggunakan sumber dana yang ada untuk memenuhi kriteria efisiensi. Pada indikator efektifitas berada pada kriteria sangat efektif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa target penerimaan PAD dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2007-2011 terus mengalami peningkatan dari tahun 2007-2011 presentase efektifitas tergolong sangat efektif yaitu sebesar 136,45%, karena realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

Nugrahani (2007) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Penerapan Konsep *Value For Money* Pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Berdasarkan perbandingan jumlah penerimaan dan pengeluaran Provinsi DIY dari tahun 2001-2004 secara *absolute* cukup ekonomis, efisien, dan efektif. Apabila kinerja berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan konsep *Value For Money*, maka kinerja keuangan Pemda DIY cukup ekonomis, dan efisien, tetapi kurang efektif. Ini ditandai dengan pencapaian efektifitas melebihi 100%, yaitu 108% pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah Propinsi DIY dalam menentukan target penerimaan. Potensi riil Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih kurang, karena jumlah realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar dibanding target yang ditentukan.

Kinerja Instansi Pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah. Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Berdasarkan pemaparan tersebut, sangat jelas terlihat bahwasanya pengukuran kinerja sangatlah dibutuhkan oleh berbagai instansi pemerintahan dalam menjalankan kinerjanya untuk mengetahui sejauh mana pencapaian visi dan misi dari instansi tersebut.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu unit kerja yang terdapat dalam organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 03 Kode Pos 56125. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Nganjuk dibangun pada tanggal 1 Mei 2001 oleh Bupati Nganjuk waktu itu yaitu Drs. H. Sutrisno R. M.Si.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Nganjuk merupakan instansi pemerintah yang bertugas untuk menyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala untuk menjaga kendaraan tidak mengandung kekurangan-kekurangan teknis yang tidak diketahui atau dapat juga menimbulkan bahaya baik untuk lalu lintas, penumpang dan lingkungan. Selain itu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Nganjuk juga mempunyai tugas untuk memberikan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan. Permasalahan yang muncul adalah, bagaimana kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Nganjuk sejauh ini yang dijelaskan pada laporan akuntabilitas kinerja pada tahun 2014?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 yang dijelaskan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

## TINJAUAN TEORETIS DAN HIPOTESIS

### Definisi Organisasi Sektor Publik

Organisasi adalah kelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama. Setiap organisasi pasti mempunyai tujuan spesifik dan unik yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan tersebut setiap organisasi akan mengkonsumsi sejumlah *input* untuk menghasilkan *output*, dalam arti setiap organisasi akan melakukan transformasi sumber-sumber ekonomi dari bentuk yang satu menjadi bentuk lain yang lebih bermanfaat atau bernilai lebih tinggi.

Sektor publik seringkali dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan Sektor umum dan penyediaan barang/jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. Munculnya sektor publik ini tidak terlepas dari sejarah. Awalnya, sektor publik ini muncul karena ada kebutuhan masyarakat secara bersama terhadap barang atau layanan tertentu. Untuk menghindari terjadinya alokasi dan distribusi barang atau layanan umum yang tidak adil maka pengaturan pengalokasian dan pendistribusiannya diserahkan kepada pihak (pengurus) tertentu. Warga masyarakat akhirnya membayar sejumlah pajak untuk mendukung pengaturan barang atau layanan umum oleh pengurus tersebut.

### Definisi Kinerja dan Pengukuran Kinerja Sektor Publik

#### Kinerja

Kinerja merupakan sebuah istilah yang mempunyai banyak arti. Kinerja bisa berfokus pada *input*, misalnya uang, staf/karyawan, wewenang yang legal, dukungan politis atau birokrasi. Kinerja juga bisa berfokus pada aktivitas atau proses yang mengubah input menjadi *output* dan kemudian menjadi *outcome*, misalnya : kesesuaian program atau aktivitas dengan hukum, peraturan, dan pedoman yang berlaku, atau standar proses yang telah ditetapkan. Menurut Mahsun (2006:157) menyatakan bahwa kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Sedangkan menurut Bastian (2006:274) menjelaskan bahwa kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Lain halnya dengan Rogers (dalam Mahmudi, 2007:6) menyatakan bahwa kinerja mestinya didefinisikan sebagai hasil kerja itu sendiri (*outcomes of work*), karena hasil kerja memberikan keterkaitan yang kuat terhadap tujuan-tujuan *strategic* organisasi, kepuasan pelanggan, dan kontribusi ekonomi. Dari beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.

#### Pengukuran Kinerja

Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah harus melaksanakan pengukuran kinerja. Salah satu panduan pengukuran kinerja instansi

pemerintah adalah Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut ketentuan ini, pengukuran kinerja meliputi tahapan penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja.

Menurut Bastian (2006:275) menjelaskan bahwa pengukuran/penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Sedangkan Ulum (2009:20) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian visi dan misi organisasi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses. Lain halnya dengan pengertian penilaian kinerja menurut Rudianto (2006:312) adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu : (a) Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, yang berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik, (b) Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, (c) Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Dari berbagai pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan evaluasi atau penilaian terhadap pencapaian pelaksanaan kegiatan suatu organisasi berdasarkan tujuan, sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Informasi mengenai hasil pengukuran ini juga akan menjadi referensi dalam penentuan standar kerja untuk masa yang akan datang. Berapa besar target yang menjadi acuan dalam pencapaian pada periode yang akan datang juga bertumpu pada hasil pengukuran kinerja yang dilakukan.

### **Manfaat dan Tujuan Pengukuran Kinerja**

Manfaat pengukuran kinerja menurut Lynch dan Cross (dalam Yuwono, 2007:29) adalah sebagai berikut : (1) Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa instansi/perusahaan dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan, (2) Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal, (3) Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut.

Adapun tujuan dari pengukuran kinerja di sektor publik adalah : (1) Menciptakan akuntabilitas publik. Dengan melakukan pengukuran kinerja, akan diketahui apakah sumber daya digunakan secara ekonomis, efisien, sesuai dengan peraturan, dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, (2) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi. Pengukuran kinerja sangat penting untuk melihat apakah suatu organisasi berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan, (3) Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya. Pengukuran kinerja akan sangat membantu pencapaian tujuan organisasi dalam jangka panjangserta membentuk upaya pencapaian budaya kerja yang lebih baik di masa mendatang, (4) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai. Dengan adanya pengukuran atas kinerja pegawai, dapat diketahui apakah mereka telah bekerja dengan baik atau sebaliknya. Pengukuran kinerja dapat menjadi media pembelajaran bagi pegawai untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang

dengan melihat cerminan kinerja di masa lalu dan evaluasi kinerja di masa sekarang, (5) Memotivasi pegawai. Pengukuran kinerja dapat dijadikan alat untuk memotivasi pegawai dengan memberikan imbalan kepada pegawai yang memiliki kinerja yang baik.

### Aspek Pengukuran Kinerja

Setiap organisasi biasanya tertarik pada pengukuran kinerja dalam aspek berikut :  
**Aspek Finansial.** Aspek finansial meliputi anggaran atau *cash flow*. Aspek finansial ini sangat penting diperhatikan dalam pengukuran kinerja, sehingga kondisi keuangan dapat dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia. **Aspek Pelanggan.** Dalam globalisasi perdagangan, peran dan posisi pelanggan sangat krusial dalam penentuan strategi perusahaan. Untuk itu, manajemen perlu memperoleh informasi yang relevan mengenai tingkat kepuasan pelanggan. **Operasi dan Bisnis Internal.** Informasi operasi bisnis internal diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang tercantum dalam skema strategis. Di samping itu, informasi operasi bisnis internal juga diperlukan untuk melakukan perbaikan terus menerus atas efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. **Kepuasan Pegawai.** Di dalam instansi pemerintah yang banyak melakukan inovasi, peran strategis pegawai sungguh sangat nyata. Apabila pegawai tidak dikelola dengan baik, maka kehancuran perusahaan sulit untuk dihindari. **Kepuasan Komunitas dan Stakeholder/Shareholder.** Pengukuran kinerja perlu didesain untuk mengakomodasikan kepuasan dari para *stakeholder*. **Waktu.** Ukuran waktu juga merupakan variabel yang perlu diperhatikan dalam desain pengukuran kinerja, sehingga informasi yang dibutuhkan diharapkan relevan dan *up to date*.

### Tahap-Tahap Pengukuran Kinerja

Tahap-tahap untuk melakukan pengukuran kinerja, yaitu perencanaan strategi, penciptaan indikator, pengembangan sistem pengukuran data, penyempurnaan ukuran kinerja, dan pengintegrasian dengan proses manajemen. Berikut adalah penjelasannya :  
**Perencanaan Strategi.** Siklus pengukuran kinerja dimulai dengan proses penskemaan strategik, yang berkenaan dengan penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan, program operasional dan kegiatan/aktivitas. **Penciptaan indikator kinerja.** Indikator kinerja yang mudah dan sederhana, di mana indikator kinerja yang berupa *input, proses, output, outcomes, benefit, atau impact*. Indikator/ukuran yang mudah adalah untuk aktivitas yang dapat dihitung, misalnya jumlah klaim yang diproses. **Mengembangkan Sistem Pengukuran Kinerja.** Ada tiga kegiatan dalam tahap ini, yaitu (1) meyakinkan keberadaan data yang diperlukan dalam siklus pengukuran kinerja, (2) mengukur kinerja dengan data yang tersedia dan data yang dikumpulkan, (3) penggunaan data pengukuran kinerja yang dihimpun harus dipresentasikan dalam cara-cara yang dapat dimengerti dan bermanfaat. **Penyempurnaan Ukuran.** Pada tahapan ini, pemikiran kembali atas indikator hasil (*outcomes*) dan indikator dampak (*impact*) menjadi lebih penting dibandingkan pemikiran kembali atas indikator masukan (*inputs*) dan keluaran (*outputs*). **Pengintegrasian dengan Proses Manajemen.** Penggunaan data organisasi dapat dijadikan alat untuk memotivasi tindakan dalam organisasi.

### Indikator Kinerja

Pengertian indikator kinerja menurut Bastian (2006:267), indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*). Indikator kinerja (*performance indicator*) sering disamakan dengan ukuran kinerja (*performance measure*). Namun, sebenarnya meskipun keduanya merupakan sama-sama kriteria

pengukuran kinerja, tetapi terdapat perbedaan arti dan maknanya. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang bersifat hanya merupakan indikasi kinerja saja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif atau tidak dapat dihitung. Sedangkan ukuran kinerja (*performance measure*) adalah kriteria yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga lebih bersifat kuantitatif atau dapat dihitung (Moeheriono,2012,33).

Secara umum, indikator kinerja memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut : (1) Memperjelas tentang apa, berapa, dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, (2) Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kegiatan termasuk dalam menilai kinerja instansi pemerintah yang melaksanakannya, (3) Membangun standar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi

Adapun peranan indikator kinerja dalam pengukuran kinerja menurut sebagai berikut : (1) Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi, (2) Untuk mengevaluasi target akhir (*final outcome*) yang dihasilkan, (3) Sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial, (4) Memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan, (5) Untuk menunjukkan standar kinerja, (6) Untuk menunjukkan efektivitas, (7) Untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran, (8) Untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan biaya.

### **Elemen-Elemen Indikator Kinerja**

Menurut Bastian (2006:267) bahwa elemen-elemen indikator kinerja adalah sebagai berikut : *Pertama*, Indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. *Kedua*, Indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau nonfisik. *Ketiga*, Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Keempat*, Indikator manfaat (*benefits*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksana kegiatan. *Kelima*, Indikator dampang (*impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tindakan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

### **Pengembangan Indikator Kinerja**

Menurut Ulum (2009:280) pengukuran kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut :

**Biaya Pelayanan (*cost of service*).** Penentuan indikator kinerja harus mencakup indikator biaya, biasanya dinyatakan dalam biaya per unit. Indikator biaya ini merupakan elemen penting untuk mengukur ekonomi dan efisiensi. Indikator biaya bersifat kuantitatif dan financial. Manfaat indikator biaya adalah untuk menilai kelayakan tarif pelayanan dengan tingkat pelayanan yang diberikan serta untuk melakukan analisis keuangan.

**Penggunaan (*utilization*).** Indikator tingkat penggunaan (*utilization*) diperlukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kapasitas yang menganggur (*idle capacity*) atas sumber daya yang dimiliki organisasi. Tingkat utilitas dapat diketahui dengan cara membandingkan tingkat pemanfaatan dengan kapasitas yang tersedia atau membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan (*supply of service*) dengan permintaan publik (*publik demand*). Adanya kapasitas yang menganggur pada dasarnya akan menjadikan organisasi tidak

efektif dan efisien. Indikator ini harus mempertimbangkan preferensi publik, sedangkan pengukuran biasanya berupa presentase tertentu, misalnya pada presentase penggunaan kapasitas.

**Kualitas dan Standar Pelayanan (*quality and standards*).** Indikator kualitas pelayanan ini semisal kecepatan pelayanan, ketepatan waktu, kecepatan respon, keramahan, kenyamanan, kebersihan, keamanan, keindahan (*estetika*), etika, dan sebagainya. Sedangkan standar pelayanan terkait dengan tingkat pelayanan minimal yang harus diberikan. Pada dasarnya tujuan dibuatnya standar pelayanan adalah untuk memberikan pelayanan publik yang manusiawi, menjadikan pelanggan sebagai subjek yang harus dilayani dengan penuh hormat. Untuk menjamin kualitas pelayanan yang baik terdapat Standar Mutu Internasional (ISO).

**Cakupan Pelayanan (*coverage*).** Indikator cakupan pelayanan untuk mengetahui tingkat penyediaan pelayanan yang diberikan (*supply*) dengan permintaan pelayanan yang dibutuhkan (*demand*). Organisasi pelayanan publik dihadapkan pada masalah cakupan pelayanan yang bias dibandingkan dengan total permintaan. Oleh karena itu, pembuatan indikator cakupan pelayanan tersebut penting untuk perencanaan mengenai peningkatan kapasitas pelayanan, alternatif pelayanan atau substitusi pelayanan.

**Kepuasan (*satisfaction*).** Kepuasan pelanggan merupakan salah satu bentuk hasil pelayanan. Kepuasan pelanggan dapat dikategorikan sebagai tujuan tingkat tinggi dalam sistem pengukuran kinerja. Indikator kepuasan biasanya diukur melalui metode jajak pendapat secara langsung. Bagi pemerintah daerah, metode penjangkauan aspirasi masyarakat (*need assessment*) dapat juga digunakan untuk menetapkan indikator kepuasan. Pelanggan sangat bersifat kualitatif, oleh karena itu untuk mengetahui seberapa besar kepuasan pelanggan (masyarakat) perlu dilakukan survey kepuasan pelanggan. Survey kepuasan pelanggan tersebut kemudian dapat digunakan untuk menghitung indeks kepuasan pelanggan. Selain metode di atas, dapat juga digunakan indikator proksi misalnya jumlah komplain atau aduan dari pihak pelanggan.

### Anggaran Kinerja

Anggaran kinerja adalah suatu pendekatan sistematis untuk membantu pemerintah menjadi lebih tanggap kepada masyarakat pembayar pajak dengan mengaitkan pendanaan program pada kinerja dan produksi (Riawan, 2009:43). Fungsi-fungsi suatu sistem penganggaran secara umum adalah sebagai berikut : (1) *Financial control of input* adalah pengendalian terhadap masukan-masukan berupa belanja pegawai dan belanja barang, (2) *Management of ongoing activities* adalah menggunakan informasi biaya, aktivitas, dan hasil-hasil guna mengevaluasi keberhasilan program, (3) *Planning* adalah sistem penganggaran dipergunakan untuk perencanaan masa yang akan datang dalam dua cara, yaitu (a) Sistem anggaran mewajibkan setiap instansi menghitung berapa jumlah biaya yang dibutuhkan untuk program yang diusulkan dan jika mungkin mengaitkan biaya-biaya tersebut dengan tingkat aktivitas untuk selama beberapa tahun di masa mendatang, (b) Sistem anggaran mewajibkan kementerian negara/ lembaga pengguna anggaran beserta unit-unitnya untuk menerapkan perencanaan strategis, (4) *Setting priorities* adalah sistem penganggaran membantu dalam penentuan prioritas program dari instansi-instansi yang mengusulkan anggaran, (5) *Accountability* adalah sistem penganggaran dipergunakan untuk menginformasikan kualitas pencapaian sasaran strategis berdasarkan *out-comes* yang dicapai.

Adapun pendapat dari Direktorat Jendral Anggaran, (<http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=628>, diakses tanggal 7 Agustus 2015) anggaran kinerja mencerminkan beberapa hal, yaitu (1) Maksud dan tujuan permintaan dana, (2) Biaya dari program-program yang diusulkan dalam mencapai tujuan

ini, (3) Data kuantitatif yang dapat mengukur pencapaian serta pekerjaan yang dilaksanakan untuk tiap-tiap program. Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas. Efisiensi itu sendiri adalah perbandingan antara *output* dengan *input*. Suatu aktivitas dikatakan efisien, apabila *output* yang dihasilkan lebih besar dengan *input* yang sama, atau *output* yang dihasilkan adalah sama dengan *input* yang lebih sedikit. Anggaran ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi pada sistem anggaran tradisional, tetapi juga didasarkan pada tujuan/rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan penggunaan biaya tersebut harus efisien dan efektif.

### **Value For Money**

*Value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. Permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur *output*, karena *output* yang dihasilkan tidak selalu berupa *output* yang berwujud, akan tetapi lebih banyak berupa *intangible output*.

*Value For Money* adalah konsep pencarian dan penggunaan dana pemerintah daerah yang menerapkan prinsip 3E (Ekonomis, Efisien, dan Efektif). Artinya, pemerintah daerah harus selalu memerhatikan tiap sen/rupee dana (uang) yang diperoleh dan digunakan (Halim, 2008:335).

Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan intuisi yang selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money*. Menurut Ulum (2009:271) *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Berikut adalah penjelasannya : *Pertama*, Ekonomi adalah pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

*Kedua*, Efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang rendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standart kinerja atau target yang telah ditetapkan.

*Ketiga*, Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok *value for money*, namun beberapa pihak berpendapat bahwa tiga elemen saja belum cukup. Perlu ditambah dua elemen lain yaitu keadilan (*equity*) dan pemerataan atau kesetaraan (*equality*). Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial (*social opportunity*) yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Artinya, penggunaan uang publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata.

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dengan adanya implementasi *value for money* yang benar adalah : (1) Meningkatnya efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran, (2) Meningkatnya mutu pelayanan publik, (3) Menurunnya biaya pelayanan publik kinerja, inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan *input*, (4) Alokasi belanja lebih berorientasi pada kepentingan publik, (5) Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public cost awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

### **Pengembangan Indikator *Value For Money***

Peranan indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Hal ini tidak berarti bahwa suatu indikator akan memberikan ukura pencapaian program yang definitif. Indikator *value for money* dibagi menjadi dua bagian, yaitu : (1) indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisien), dan (2) indikator kualitas pelayanan (efektivitas). Indikator ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (*cost of input*). Dengan kata lain, ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa *input* dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (*spending less*). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya : staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan. Indikator tersebut memberikan informasi tentang konversi masukan menjadi keluaran (yaitu : efisiensi dari proses internal). Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Indikator efisiensi dan efektivitas harus digunakan secara bersama-sama, karena disatu pihak mungkin pelaksanaannya sudah dilakukan secara ekonomis dan efisien, akan tetapi *output* yang dihasilkan tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Sedang di pihak lain, sebuah program dapat dikatakan efektif dalam mencapai tujuan, tetapi mungkin dicapai dengan cara yang tidak ekonomis dan efisien. Jika suatu program efektif dan efisien maka program program yang dilaksanakan dapat dikatakan *cost-effectiveness*. Indikator efektivitas biaya (*cost-effectiveness*) merupakan kombinasi informasi efisiensi dan efektivitas dan memberikan ukuran kinerja *bottom line* yang dalam sektor publik analog dengan pelayanan masyarakat.

### **Langkah-langkah Pengukuran *Value For Money***

Menurut Mahmudi (2007:93) pengukuran kinerja *value for money* dibangun atas tiga komponen utama, yaitu : (1) Penentuan Misi, Visi, Tujuan, Sasaran, dan Target Tahap pertama yang harus dilakukan organisasi adalah menentukan misi, visi, tujuan, dan target kinerja. Penentuan misi, visi, tujuan, sasaran dan target dapat dapat didahului dengan kegiatan penjarangan aspirasi masyarakat. Penjarangan aspirasi masyarakat berfungsi untuk mengetahui kecenderungan kebutuhan publik dan kecenderungan pasar (*trendwatching*), sehingga berdasarkan informasi tersebut organisasi dapat melakukan *envisioning*, yaitu menentukan visi dan misi organisasi, (2) Penentuan indikator *Input*, *Output*, dan *Outcome* Bahwa untuk bisa mengukur ekonomi, efisiensi, efektivitas organisasi harus mengetahui tingkat *input*, *output*, dan *outcome*. Tahap pertama organisasi harus membuat indikator *input*, *output*, *outcome*, *benefit*, dan *impact*. Kemudian tahap berikutnya adalah pengukuran *input*, *output*, *outcome*, dan *impact* tersebut, (3) Pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Setelah penentuan indikator *input*, *output*, *outcome*, *benefit*, dan *impact* selesai dilakukan, tahap berikutnya organisasi dapat mendesain pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ukuran ekonomi mengindikasikan alokasi biaya, yaitu mengukur biaya *input* (*cost of input*). Ukuran ekonomi berupa berapa anggaran yang dialokasikan. Ukuran efisiensi mengukur biaya *output* (*cost of output*). Ukuran efisiensi mengukur seberapa baik organisasi mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan *output*. Ukuran efektivitas mengukur kesuksesan organisasi, program, atau aktivitas dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran Obyek Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pengukuran kinerja menggunakan perspektif *Value For Money* di UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pengujian Kendaraan Bermotor Daerah Kabupaten Nganjuk, sehingga dengan pedoman ini kinerja (UPTD) Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk dapat sesuai dengan *Value For Money*. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Suharsaputra, 2012:181). Objek yang dipilih adalah wilayah kerja pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan mengambil fokus UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pengujian Kendaraan Bermotor Daerah Kabupaten Nganjuk. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)

### **Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti terhadap obyek yang diteliti, dan data primer tersebut diperoleh dari hasil dilakukannya wawancara. Adapun data sekunder adalah data yang bisa diperoleh dari hasil laporan kinerja. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah : (1) Survey Pendahuluan, (2) Survey Lapangan. Peneliti melakukan tinjauan langsung pada obyek penelitian guna memperoleh data-data yang diperlukan dengan melakukan pengumpulan data melalui beberapa cara, seperti: (a) Wawancara mendalam secara langsung dengan subjek penelitian, (b) Dokumentasi, merupakan penggunaan teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa atau melihat langsung dokumen, catatan tertulis, arsip-arsip, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, seperti mengumpulkan data-data obyek penelitian dari tempat obyek penelitian berupa gambaran umum obyek penelitian, profil Instansi, meliputi gambaran umum instansi, lokasidan bentuk instansi, struktur organisasi serta visi dan misi instansi, laporan kinerja pada UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pengujian Kendaraan Bermotor Daerah Kabupaten Nganjuk.

### **Satuan Kajian**

Penelitian deskriptif kualitatif perlu menjelaskan satuan kajian yang merupakan satuan terkecil obyek penelitian yang diinginkan peneliti sebagai klasifikasi pengumpulan data. Serta memberikan gambaran sesuai dengan kenyataan ataupun fakta-fakta yang ada pada saat diadakan penelitian, obyek penelitian yang dibutuhkan : (1) Pengukuran Kinerja, (2) *Value For Money*. *Value For Money* adalah konsep pencarian dan penggunaan dana pemerintah daerah yang menerapkan prinsip 3E (Ekonomi, Efisien, dan Efektif). Artinya, pemerintah daerah harus selalu memerhatikan tiap sen/rupee dana (uang) yang diperoleh dan digunakan (Halim, 2008:335).

### **Teknis Analisa Data**

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan keterangan yang lengkap dan benar agar pihak lain lebih mudah memperoleh gambaran mengenai sifat (karakteristik) obyek dari data tersebut. Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut : (1) Mengumpulkan dan

mengidentifikasi data penelitian pada UPTD (Unit Teknis Pelaksana Daerah) Pengujian Kendaraan Bermotor Daerah Kabupaten Nganjuk baik kegiatan operasionalmanajerial dan program kerja maupun target yang akan di capai, (2) Mendeskripsikan data penelitian yang terkait dengan materi kajian penelitian, (3) Analisis dan pembahasan pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja, (4) Memberikan simpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pelayanan Publik yang Dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Nganjuk dalam Pengujian Kendaraan Bermotor**

Pola pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Nganjuk menggunakan pola pelayanan terpadu satu pintu, karena bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan merupakan pelayanan yang terintegrasi, yaitu pelayanan yang masih berkaitan satu sama lain dan dilayani dalam satu pintu biasa disebut dengan satu tempat. Pada UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pengujian Kendaraan Bermotor mulai dari pelayanan administrasi, pra uji mekanik hingga pelayanan uji mekanik dilayani dalam satu tempat yang sama yaitu di Unit itu sendiri. Berbeda dengan pelayanan satu atap, dimana bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak memiliki keterkaitan proses. Pernyataan di atas didukung oleh hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Kasubag Tata Usaha, Bapak Moch. Zunaidi, SH.

“...sistem pelayanan yang dilakukan di UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pengujian Kendaraan Bermotor memang memiliki keterkaitan proses mulai dari administrasi sampai uji mekanik. Dalam pelayanan ini UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pengujian Kendaraan Beemotor tidak perlu berkoordinasi dengan lembaga lain, semua jenis pelayanan diselesaikan di bagian itu sendiri”. (hasil wawancara pada tanggal 14 Juli 2015)

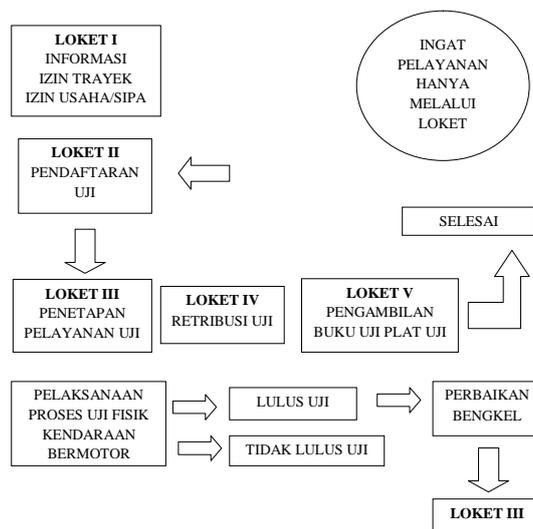
Berdasarkan hasil wawancara yang telah disampaikan dari Kasubag Tata Usaha UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pengujian Kendaraan Bermotor, peneliti menganggap bahwa jenis pelayanan yang diberikan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pengujian Kendaraan Bermotor tergolong ke dalam jenis pelayanan terpadu satu pintu, pelayanan satu pintu ini dapat memberikan manfaat bagi pemilik kendaraan bermotor karena dapat mempermudah pemilik kendaraan bermotor apabila akan mendaftarkan kendaraan bermotornya untuk di uji kelayakannya. Pemilik kendaraan tidak perlu berpindah-pindah tempat dalam menyelesaikan segala urusan administrasi, UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pengujian Kendaraan Bermotor telah memberikan kemudahan dengan fasilitas yang cukup memadai seperti layanan foto copy berada satu tempat dengan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pengujian Kendaraan Bermotor.

### **Mekanisme Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor**

UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pengujian Kendaraan Bermotor menggunakan sistem *New Public Management* (NPM), manajemen yang digunakan ini mengadopsi dari manajemen bisnis yang berorientasi pada konsumen/pelanggan, sebagai literature untuk mengembangkan manajemen instansi pemerintah, maksudnya adalah pemerintah dalam pelayanan masyarakat menggunakan NPM sebagai rujukan mengatur sebuah instansi. Pengembangan manajemen instansi pemerintah berkaitan dengan peran pemerintah dalam menerapkan pelayanan prima terhadap *public* (masyarakat). Berorientasi pada konsumen berarti mengutamakan kepuasan pelanggan, pelanggan yang dimaksud

disini adalah masyarakat pemilik kendaraan bermotor, sehingga pelayanan yang diberikan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pengujian Kendaraan Bermotor adalah mengutamakan kepuasan masyarakat.

Dikaji secara empiris praktik mekanisme pelayanan publik yang diberikan oleh UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pengujian Kendaraan Bermotor yang secara umum rincian mekanisme pelaksana administrasi pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut : (1) Pemohon/pemilik kendaraan datang pada tanggal uji yang telah ditetapkan pada saat mendaftarkan kendaraan bermotornya, dengan membawa persyaratan administrasi yang telah ditentukan dan meyerahkan kepada oetugas loket dua. Adapun persyaratan tersebut adalah sebagai berikut : mengisi formulir permohonan; membayar permohonan uji; melampirkan foto copy jati diri/surat instansi; foto copy STNK, STUK, gesekan nomor mesin, nomor angka dan nomor uji, surat kuasa dengan materai, (2) Petugas di loket dua akan menerima berkas persyaratan dan memeriksa kelengkapannya serta memberikan bukti pembayaran pendaftaran uji jika persyaratan sudah lengkap, (3) Dari loket dua pemohon langsung ke loket empat untuk melakukan pembayaran retribusi pengujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (4) Setelah melengkapi persyaratan administrasi, penguji akan pelaksanaan pemeriksaan teknis kendaraan yang meliputi pra uji dan uji mekanik, (5) Apabila kendaran yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan dinyatakan tidak lulus, maka pemohon akan diberikan pemberitahuan secara tertulis untuk segera dilakukan perbaikan dan melaksanakan pengujian ulang dengan ketentuan yang telah ditetapkan, (6) Apabila pemohon/pemilik kendaraan keberatan dengan hasil uji, maka pemohon berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis untuk dilaksanakan pengujian ulang, (7) Kendaraan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan dinyatakan lulus akan dilaksanakan tahap penyelesaian administrasi yang meliputi : penulisan buku, penulisan kartu induk, pengetokan plat uji dan pengecatan tanda samping, (8) Petugas di loket lima akan memanggil pemohon untuk mengembalikan buku uji dan plat uji, (9) Setelah semua tahapan pengujian selesai, kendaraan yang dinyatakan lulus uji kelayakan, siap untuk beroperasi. Pemilik kendaraan melakukan pembayaran layanan pengujian secara menyeluruh.



**Gambar 1**  
**Mekanisme Pelaksanaan Pelayanan Administrasi**  
**Pengujian Kendaraan Bermotor**

Sumber : UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pengujian Kendaraan Bermotor Daerah Kabupaten Nganjuk

### Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor

Bagi pemilik/pengurus kendaraan yang akan diuji berkala harus membayar retribusi sesuai dengan ketentuan kepada Petugas Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima di Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Nganjuk, dengan ketentuan besarnya retribusi sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor**

No	Jenis Retribusi	Biaya Retribusi (Rp)
1.	Biaya pendaftaran uji	3.000,00
2.	Retribusi uji mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus	18.000,00
3.	Retribusi uji mobil penumpang umum (MPU), mobil bus kecil, kereta gandengan dan kereta tempelan	15.000,00
4.	Biaya tanda bukti lulus pengujian kendaraan bermotor	
	a. Buku uji	7.500,00
	b. Tanda uji	5.000,00
5.	Pengecatan tanda samping yang berupa :	
	a. Pengecatan data kendaraan dan masa berlaku uji	5.000,00
	b. Pengecatan secara keseluruhan	10.000,00
6.	Penggantian buku uji (rusak)	10.000,00
7.	Penggantian buku uji dan tanda uji yang hilang	25.000,00
8.	Rekomendasi numpang uji	10.000,00
9.	Rekomendasi mutasi (keluar/masuk) dan rubah sifat atau bentuk	10.000,00
10.	Biaya tambahan karena terlambat daftar uji sebesar 50%	1.500,00
11.	Biaya tambahan karena kendaraan terlambat datang untuk uji pada waktu yang telah ditentukan	3.000,00
12.	Biaya tambahan karena terlambat uji 1 hari sampai dengan 1 bulan keterlambatan	10.000,00

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2011, tentang Retribusi Jasa Umum

Secara formatif rincian biaya yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor adalah seperti pada tabel 1 di atas, namun jika dikaji secara empiris pemilik kendaraan bermotor banyak yang membayar lebih besar dari yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena pemilik kendaraan bermotor lebih memilih menggunakan biro jasa pelayanan, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih banyak karena harus membayar biro jasa sebagai imbalan atas jasa yang diberikan.

Rincian biaya normal yang dikeluarkan pemilik kendaraan bermotor secara normatif adalah sebagai berikut : total biaya untuk bus, mobil barang, kendaraan khusus Rp38.500,00. Untuk poin 5b dan 6-12 menyesuaikan kebutuhan pemilik kendaraan bermotor karena setiap kendaraan yang diuji memiliki kondisi yang berbeda-beda. Namun fakta yang terjadi di lapangan pemilik kendaraan mengeluarkan biaya kurang lebih sebesar Rp70.000,00 sudah termasuk biaya biro jasa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Wakidin, pemilik kendaraan truk yaitu sebagai berikut :

“...saya membayar biaya pengujian totalnya Rp70.000,00 karena saya menggunakan biro jasa yang membantu semua proses mulai dari administrasi sampai pengujian, jadi saya langsung terima jadi.” (hasil wawancara pada tanggal 14 Juli 2015)”

UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pengujian Kendaraan Bermotor Daerah Kabupaten Nganjuk tidak melarang adanya biro jasa. Karena biro jasa hanya membantu pemilik kendaraan bermotor dalam menyalurkan kegiatan pengujian kendaraan bermotor, karena kegiatan ini tidak sama halnya seperti pada proses pembuatan SIM. Biro jasa hanya sebagai perantara untuk memudahkan pemilik kendaraan bermotor supaya dalam melakukan pengujian tidak perlu dating dan menyelesaikan proses sendiri, walaupun demikian proses pengujian tetap dilayani petugas sesuai dengan prosedur. Kendaraan tetap diuji kelayakannya, jika kendaraan tidak layak uji pemilik kendaraan tetap diberikan informasi secara benar kondisi kendaraan bermotor miliknya supaya diperbaiki untuk dilakukan pengujian berkala.

Hasil wawancara yang telah dilakukan pada beberapa pihak di atas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pengujian Kendaraan Bermotor Daerah Kabupaten Nganjuk tidak terdapat pungli (pungutan liar) tetapi terdapat biro jasa yang fungsinya adalah membantu pemilik kendaraan untuk mempermudah proses mekanisme pengujian kendaraan bermotor.

### Pembahasan

Berdasarkan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2014, telah ditetapkan sasaran dengan dukungan program dan kegiatan sebagai salah satu strategi pencapaian sasaran. Dalam mengarahkan pencapaian sasaran secara efektif, maka disusunlah program dan kegiatan yang implementasinya diatur melalui kebijakan/*policy* yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Nganjuk dengan rincian program dan kegiatan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran tahun 2014. Adapun Program yang akan dibahas dalam skripsi ini, sebagai berikut :

***Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor, dengan indikator kinerja : Pengujian Kendaraan Bermotor.***

(LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2014) : (a) *Input*: Input dana, (b) *Output*: Terlaksananya sarana angkutan umum yang layak jalan, (c) *Outcome*: Meningkatkan pelayanan transportasi daerah yang aman kepada masyarakat

**Tabel 2**  
**Data Pencapaian Kinerja Program UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014**

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian
Prosentase sarana angkutan umum yang layak jalan	100%	89,31%	89,31%

Sumber : LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Nganjuk

Melihat dari capaian di atas, UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pengujian Kendaraan Bermotor Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2014 mencapai 89,31%. Dilihat dari tabel 3 (Standart Penilaian Kinerja) bahwa prosentase 89,31% penilaiannya adalah tercapai.

Hasil dari pelaksanaan kinerja kegiatan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pengujian Kendaraan Bermotor Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$\text{Presentase} = \frac{\text{Jumlah angkutan umum yang lulus uji KIR pada tahun 2014}}{\text{Jumlah angkutan umum yang wajib uji KIR pada tahun 2014}} \times 100\%$$

Adapun data terkait formula diatas disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3

**Hasil Pelaksanaan Kinerja Kegiatan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pengujian Kendaraan Bermotor Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014**

<b>Uraian Data</b>	<b>Jumlah</b>
Jumlah angkutan umum yang lulus uji KIR pada tahun 2014	3042 kendaraan
Jumlah angkutan umum yang wajib uji KIR pada tahun 2014	3406 kendaraan

Sumber : LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Nganjuk

Dari data diatas dapat dihitung nilai indikator persentase sarana angkutan umum yang laik jalan sebagaimana berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase sarana angkutan umum yang laik jalan} &= \frac{3042}{3406} \times 100\% \\ &= 89,31\% \end{aligned}$$

Persentase cakupan sarana angkutan umum yang layak jalan tahun 2014 adalah sebesar 89,31%. Pencapaian indikator kinerja tersebut didukung adanya kebijakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Daerah Kabupaten Nganjuk. Melalui program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dilakukan upaya pengujian kendaraan bermotor, dimana dalam kegiatan menguji menggunakan sarana dan prasarana yang memadai, dilakukan oleh tim penguji yang sudah berpengalaman, dan tidak adanya pungli atau Pungutan Liar. Sehingga para pemilik kendaraan akan nyaman dan aman. Jumlah angkutan umum yang wajib uji KIR pada tahun 2014 sebesar 3406 unit kendaraan, kendaraan yang dinyatakan lulus uji ialah sebesar 3042 unit kendaraan. Dengan demikian dapat dihitung besarnya capaian untuk indikator ini sebesar 89,31%.

### **Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Nilai Ekonomi**

Ekonomi adalah pemerolehan *input* dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif (Ulum, 2009:271). Ukuran ekonomi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain dengan cara membandingkan harga yang digunakan organisasi sektor publik dengan organisasi sejenis, membandingkan dengan harga pasar, atau membandingkan dengan anggaran yang telah disetujui. Nilai ekonomi dari program yang dilakukan oleh UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pengujian Kendaraan Bermotor Daerah Kabupaten Nganjuk, dapat diukur dengan membandingkan dana yang terealisasi dengan tenaga kerja, sarana dan prasarana, hasil kinerja yang dicapai, dan lain-lain.

Tabel 4

**Data Realisasi Anggaran UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014**

<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi</b>	
		<b>Rp</b>	<b>%</b>
Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	515.683.750	494.998.000	95,99%

Sumber : LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan tabel tiga, tentang data realisasi anggaran UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2014 ditinjau dari segi ekonomi menunjukkan hasil yang relatif baik. Hal ini dapat dilihat pada jumlah realisasi lebih kecil dari jumlah anggaran. Sehingga dinas tersebut dapat mengestimasi jumlah anggaran yang di buat lebih kecil dari hasil realisasinya atau sebesar 95,99%. Oleh karena itu dalam memberikan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Nganjuk dapat terealisasi dengan baik, dan dilakukan secara ekonomis atau secara hemat dengan biaya yang minimal, dan merealisasikan program dan kegiatan yang menjadi tujuan dari instansi pemerintah, untuk memberikan data pelayanan dari program yang dilaksanakan dengan baik kepada masyarakat dengan biaya yang rendah.

#### **Nilai Efisiensi**

Efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang rendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standart kinerja atau target yang telah ditetapkan. (Ulum, 2009:271). Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dikatakan efisien jika dapat menghasilkan *output* dengan hasil yang sebesar-besarnya dengan menggunakan *input* yang serendah-rendahnya. Sehingga suatu instansi pemerintah dapat dikatakan efisien jika suatu *input* tertentu dengan biaya yang minimal dapat menghasilkan *output* dengan hasil yang maksimal.

Berdasarkan tabel dua (data pencapaian kinerja) dan tabel tiga (data realisasi anggaran) dijelaskan diatas bahwa kinerja UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pengujian Kendaraan Bermotor Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 dapat dinilai sudah efisien. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pengujian Kendaraan Bermotor Daerah Kabupaten Nganjuk merealisasikan kegiatan ataupun programnya dengan menggunakan dana yang tertera di tabel tiga (data realisasi anggaran) untuk mencapai hasil kinerja sesuai target.

Dapat dilihat dengan anggaran sebesar Rp515.683.750 dan merealisasikan dana tersebut sebesar Rp494.998.000, dapat mencapai *output* nya, yaitu terlaksananya sarana angkutan umum yang layak jalan sebesar 89,31%. Suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan atau programnya dikatakan efisien jika mampu menghasilkan *output* tertentu tertentu dengan hasil yang sebesar-besarnya dengan menggunakan *input* yang serendah-rendahnya. Seperti yang dinyatakan oleh Kassubag Tata Usaha UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pengujian Kendaraan Bermotor Daerah Kabupaten Nganjuk, Bapak Moch. Zunaidi, SH :

"...dengan adanya *input* yaitu sumber dana yang seminimal mungkin bisa di dapat hasil *output* yang maksimal dari rencana target. Dana-dana tersebut digunakan untuk merawat alat-alat pengujian, biaya pelatihan pegawai yang menguji, melengkapi sarana dan prasarana. Sehingga masyarakat dapat nyaman, aman, dan akan terus melakukan pengujian secara berkala". ((hasil wawancara pada tanggal 11 Agustus 2015)

Dengan demikian, dari *input* yang seminimal mungkin dapat di peroleh hasil *output* yang maksimal sehingga *output* yang di hasilkan dari tahun ke tahun lebih dari rencana dari target awal, sehingga kinerja UPTD (Unit Pengujian Teknis Daerah) Pengujian Kendaraan Bermotor Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 dapat dikatakan efisien.

#### **Nilai Efektivitas**

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output* (Ulum, 2009:271). Berdasarkan tabel 2 (data pencapaian kinerja), diketahui bahwa kinerja UPTD

(Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pengujian Kendaraan Bermotor Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 secara umum dapat di nilai efektif rencana program kerja dan kegiatan operasi organisasi sektor publik yang di wujudkan dalam indikator kinerja *output* maupun *outcome* telah berhasil menjalankan tujuan organisasi dalam mencapai dan merealisasikan program sesuai capaian kinerja yang diharapkan. Hal ini terlihat dari hasil-hasil capaian kinerja indikator keluaran (*output*), indikator hasil (*outcome*), maupun dampaknya. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Kassubag Tata Usaha, Bapak Moch. Zunaidi, SH :

"...dengan adanya *output* yaitu terlaksananya sarana angkutan umum yang layak jalan, maka akan diketahui *outcome* nya yaitu meningkatkan pelayanan transportasi daerah yang aman kepada masyarakat. Jadi masyarakat akan aman dan nyaman saat mengendarai kendaraan yang sudah diuji kelayakannya". (hasil wawancara pada tanggal 11 Agustus 2015)

Dengan demikian tahun 2014 UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pengujian Kendaraan Bermotor Daerah Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan program yang sesuai target dapat terlihat dari *outcome* nya. Dari *outcome*, terlihat bahwa program UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pengujian Kendaraan Bermotor Daerah Kabupaten Nganjuk sudah efektif.

Berdasarkan pembahasan mengenai pengukuran kinerja program pada (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor Daerah Kabupaten Nganjuk, maka dibuat tabel hasil pencapaian kinerja :

**Tabel 5**  
**Standart Penilaian Kinerja UPTD Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika**  
**Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014**

Nilai %	Pencapaian
80 - lebih dari 100	Tercapai
60 - 79	Kurang Tercapai
Kurang dari 60	Tidak Tercapai

Sumber data: LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Nganjuk

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut : (1) UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pengujian Kendaraan Bermotor Daerah Kabupaten Nganjuk dalam menyajikan pelaporan kinerja dikatakan sudah sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) terkait dengan bidang perhubungan, dan bidang komunikasi dan informatika, (2) Penilaian kinerja UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pengujian Kendaraan Bermotor Daerah Kabupaten Nganjuk menggunakan *value for money*, dengan instrumen penilaian adalah ekonomis, efisiensi dan efektivitas, (3) Hasil wawancara dengan Kassubag Tata Usaha UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pengujian Kendaraan Bermotor Daerah Kabupaten Nganjuk, Bapak Moch. Zunaidi, SH dan dari tabel data realisasi anggaran mengenai tingkat ekonomi dari kinerja, hal ini sudah tercapai karena dapat menghemat biaya sebesar Rp20.685.750,00 atau mencapai 95,99%, (4) Hasil pengukuran nilai efisiensi pada program UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pengujian Kendaraan Bermotor Daerah Kabupaten Nganjuk dikatakan sudah efisien. Terlihat dari *input* yang minimal atau realisasi anggaran yang ada pada tabel 4, mampu menghasilkan *output* atau pencapaian target kinerja yang ada tabel 2 yang maksimal, (5) Berdasarkan hasil wawancara dengan Kassubag Tata Usaha Bapak Moch. Zunaidi, SH, dapat diketahui bahwa kinerja UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) sudah

efektif, karena dengan adanya program dan kegiatan organisasi yang diwujudkan dalam indikator kinerja *output* maupun *outcome* telah berhasil dalam mencapai tujuan organisasi yang diharapkan. Hal ini tampak dari sudah banyaknya para pengemudi/pemilik kendaraan yang melakukan mengujikan kendaraannya sehingga terciptanya pelayanan transportasi daerah yang aman kepada masyarakat.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut : (1) Memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan terus memberikan kenyamanan bagi masyarakat, karena pentingnya pengujian kendaraan bermotor adalah untuk terciptanya transportasi daerah yang aman kepada masyarakat, (2) Dalam proses perencanaan anggaran sebaiknya mengetahui rincian data-data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program atau kegiatan serta mengevaluasi program pada periode sebelumnya, sehingga tidak terjadi selisih yang terlalu besar antara rencana anggaran dengan realisasi anggaran pada tahun berikutnya, (3) Terus merawat alat-alat pengujian, memberikan pelayanan yang prima, mempermudah kegiatan pengujian dan menekan biaya pengujian dengan harga yang murah, misalnya biaya pendaftaran uji, biaya retribusi , dll. Sehingga akan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor, (4) Keberhasilan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pengujian Kendaraan Bermotor pada tahun 2014 lebih di jadikan motivasi bagi seluruh pegawai agar selalu meningkatkan kinerjanya secara terus menerus untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pelayanan transportasi, (5) Rutin memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petugas pengujian agar mampu melayani masalah transportasi dengan baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arfan, D. 2014. Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2011-2012. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Anisa, D. 2011. Evaluasi Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Makassar Melalui Pendekatan Value For Money. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin.
- Bastian, I. 2006. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Cetakan 1. BPFE. Yogyakarta.
- Direktorat Jendral Keuangan. "Anggaran Berbasis Kinerja". 7 Agustus 2015. <http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=628>.
- Halim, A. 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Liando, S dan Elim. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode Value For Money. *Jurnal EMBA* (3).
- Lembaga Administrasi Negara. 2003. Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 239. LAN. Jakarta.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP AMP YKPN. Jakarta.
- Mahsun, M. 2006. *Akuntansi sektor publik*. Edisi Kedua. BPFE. Yogyakarta.
- Moeheriono. 2012. *Indikator Kinerja Utama*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Nordiawan, D. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Nugrahani, S. 2007. Analisis Penerapan Konsep Value For Money Pada Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Volume 1*. AKMENKA UPY. Yogyakarta.

- Purnamasari, S dan Cipta. 2014. Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berdasarkan Value For Money Audit Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2007-2011. *Jurnal Volume 2*. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja.
- Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2011. Tentang Retribusi Jasa Umum.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- Rai, I, G. 2008. *Audit Kinerja pada Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Rudianto. 2006. *Akuntansi manajemen*. Grasindo. Jakarta.
- Suharsaputra, U. 2012. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Tjandra, R. 2009. *Hukum Keuangan Negara*. PT Gramedia widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Ulum, I. 2009. *Audit Sektor Publik*. Bumi Aksara. Jakarta
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Yuwono, S. 2007. *Petunjuk Praktis Penyusunan Balanced Scorecard Menuju Organisasi yang Berfokus pada Strategi*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.